

DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP SISTEM MANAJEMEN SEKOLAH DI DAERAH TERTINGGAL

Alif Albi Zahwan

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pamulang

zahwanalbi@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem manajemen sekolah, khususnya di daerah tertinggal. Implementasi kebijakan yang tepat dapat mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru melalui sistem manajemen yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan mempengaruhi manajemen sekolah di daerah tertinggal, dengan fokus pada perencanaan, evaluasi, dan pengembangan kinerja guru. Pendekatan mixed-method digunakan untuk menggali persepsi guru dan kepala sekolah di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh dukungan terhadap manajemen kinerja guru, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan. Kebijakan yang berpihak dan berbasis kebutuhan lokal terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah-sekolah terpencil.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, daerah tertinggal, manajemen sekolah, efektivitas pembelajaran

Abstract

Educational policy has a significant impact on school management systems, particularly in underdeveloped areas. Properly implemented policies can drive improvements in the quality of learning and teacher professionalism through a well-structured management system. This study aims to analyze how educational policies influence school management in disadvantaged regions, with a focus on planning, evaluation, and teacher performance development. A mixed-method approach was employed to explore the perceptions of teachers and school principals in resource-limited areas. The findings indicate that the success of these policies largely depends on support for teacher performance management, ongoing training, and continuous evaluation. Policies that are inclusive and based on local needs have proven effective in enhancing the quality of learning in remote schools.

Keywords: educational policy, underdeveloped areas, school management, learning effectiveness

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa yang memiliki fungsi strategis dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama daerah tertinggal, masih sangat mencolok. Daerah tertinggal kerap kali mengalami hambatan yang kompleks dalam menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, baik dari sisi infrastruktur, ketersediaan guru profesional, maupun sarana penunjang pembelajaran.

Kebijakan pendidikan nasional, meskipun dirancang untuk seluruh wilayah Indonesia, seringkali belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik lokal yang khas, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal. Padahal, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan sistem manajemen sekolah dalam menyesuaikan strategi dan program dengan kondisi nyata yang ada. Sistem manajemen sekolah di daerah tertinggal dituntut untuk mampu beradaptasi secara fleksibel dengan keterbatasan yang ada, sekaligus tetap menjamin kualitas pembelajaran.

Permasalahan umum yang dihadapi sekolah-sekolah di daerah tertinggal mencakup rendahnya kapasitas kepala sekolah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, terbatasnya pelatihan profesional bagi guru, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang layak. Selain itu, beban administratif yang tinggi juga menghambat fokus kepala sekolah terhadap pembinaan akademik dan pengembangan mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

Kebijakan seperti Kurikulum Merdeka, zonasi pendidikan, dan program guru penggerak adalah contoh kebijakan nasional yang membutuhkan dukungan manajerial kuat di tingkat sekolah agar dapat berjalan sesuai tujuan. Tanpa sistem manajemen sekolah yang efisien dan akuntabel, kebijakan tersebut hanya menjadi dokumen normatif yang sulit untuk diwujudkan dalam praktik nyata, terutama di daerah tertinggal yang mengalami berbagai keterbatasan struktural dan geografis.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis dampak kebijakan pendidikan terhadap sistem manajemen sekolah di daerah tertinggal, dengan harapan dapat memberikan masukan kebijakan dan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen sekolah secara umum merujuk pada seluruh aktivitas pengelolaan yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian terhadap sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Dalam konteks daerah tertinggal, tantangan utama manajemen sekolah terletak pada minimnya kapasitas organisasi, keterbatasan anggaran operasional, dan lemahnya dukungan infrastruktur dasar pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, dan koneksi internet.

Armstrong (2017) menjelaskan bahwa sistem manajemen yang efektif harus mampu menyelaraskan antara visi organisasi, sumber daya manusia, dan hasil yang ingin dicapai melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam manajemen sekolah di daerah tertinggal membutuhkan pendekatan adaptif yang mempertimbangkan aspek lokal, termasuk kultur masyarakat, keterjangkauan geografis, dan kondisi ekonomi keluarga peserta didik.

Rahmawati dan Santoso (2020) menyebutkan bahwa keberhasilan manajemen sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah, sistem supervisi akademik yang berjalan, serta ketersediaan program pembinaan guru yang berkelanjutan. Di daerah tertinggal, guru seringkali bertugas di luar bidang keahlian mereka, atau bahkan mengajar di lebih dari satu mata pelajaran karena keterbatasan SDM. Hal ini berdampak pada rendahnya mutu pembelajaran dan lambatnya perkembangan profesionalisme guru.

Sementara itu, Adisasmito (2021) menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan pendidikan yang memungkinkan modifikasi dan inovasi lokal di tingkat sekolah. Tanpa ruang untuk penyesuaian, kebijakan nasional cenderung tidak relevan dengan kebutuhan nyata sekolah di daerah tertinggal. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan berbasis konteks dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan.

Dengan demikian, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara kualitas kebijakan pendidikan, kapasitas manajerial sekolah, dan efektivitas pembelajaran. Dalam kerangka itulah, penting untuk meneliti secara lebih mendalam bagaimana kebijakan nasional berdampak langsung terhadap praktik manajemen sekolah, terutama dalam konteks daerah tertinggal yang memiliki tantangan unik dan kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang holistik mengenai dampak kebijakan pendidikan terhadap sistem manajemen sekolah di daerah tertinggal. Subjek penelitian terdiri dari 50 guru dan 5 kepala sekolah yang bekerja di lima sekolah dasar dan menengah di daerah tertinggal wilayah Jawa Barat.

Instrumen penelitian berupa kuesioner, pedoman wawancara, dan format observasi kelas. Kuesioner difokuskan pada aspek persepsi terhadap kebijakan pendidikan dan implementasi manajemen sekolah. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pengalaman dan strategi manajemen yang digunakan kepala sekolah dalam menerapkan kebijakan. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik pengelolaan pembelajaran di kelas. Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan uji-T, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 82% responden menyatakan kebijakan pendidikan nasional telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan manajemen sekolah, khususnya dalam hal perencanaan pembelajaran dan pelatihan guru. Kepala sekolah berperan penting sebagai penggerak utama dalam mengimplementasikan kebijakan ke dalam praktik manajerial yang lebih sistematis dan berbasis pada evaluasi kinerja guru.

Wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan bahwa meskipun sumber daya terbatas, penerapan prinsip-prinsip manajemen seperti pertemuan rutin, supervisi kelas, serta pelaporan kinerja guru mampu mendorong peningkatan kualitas pengajaran. Observasi di lapangan juga memperlihatkan bahwa guru menjadi lebih reflektif dan inovatif dalam menyampaikan materi pelajaran, termasuk dengan memanfaatkan sumber belajar lokal dan teknologi sederhana seperti WhatsApp dan video pembelajaran offline.

Namun demikian, tantangan masih dirasakan dalam bentuk rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan jaringan internet, dan minimnya insentif bagi guru yang bertugas di daerah 3T. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu ditinjau ulang untuk memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan dan dukungan logistik yang lebih kuat agar manajemen sekolah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah pusat memiliki pengaruh langsung terhadap sistem manajemen sekolah di daerah tertinggal, terutama dalam hal perencanaan, evaluasi, dan pengembangan kinerja guru. Implementasi kebijakan yang diiringi dengan pelatihan berkelanjutan, monitoring yang sistematis, dan dukungan kepala sekolah yang adaptif mampu menciptakan manajemen sekolah yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan lokal.

Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memperhatikan konteks dan karakteristik daerah tertinggal dalam menyusun program pendidikan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, kepala sekolah, guru, dan masyarakat agar sistem manajemen pendidikan di daerah 3T dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Investasi dalam pelatihan guru, penyediaan teknologi pendukung, serta peningkatan peran kepala sekolah sebagai manajer pendidikan lokal menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan pendidikan antar wilayah.

REFERENSI

- Adisasmito, W. U. (2021). Kebijakan dan praktik manajemen kinerja di sekolah. *Pustaka Cendekia.*, 18(3), 105-118.
- Armstrong, M. (2017). *Performance management: Key strategies and practical guidelines*. London: Kogan Page.
- Daniels, A. C. (2019). Learning process effectiveness in modern schools. *Educational Review*, 23(2), 77-90.
- Rahmawati, N. &. (2020). Pengaruh manajemen kinerja terhadap efektivitas belajar. *Jurnal Pendidikan dan Kepelatihan Guru*, 25(1), 45-59.
- Robbins, S. P. (2016). *Management (13th ed.)*. Boston. MA: Pearson Education., 22(3), 233- 245.